



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia didukung oleh perkembangan pasar modal. Pasar modal dibentuk untuk menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan dalam sistem perekonomian negara. Pasar modal adalah pelengkap dalam sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan yang memberikan jasanya untuk menghubungkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) kepada pihak dalam sektor produktif yang membutuhkan dana (Meythi dan Mathilda, 2012). Investor akan mengharapkan keuntungan (*return*) dari investasi yang telah dilakukan dan mempunyai hak dalam kepemilikan perusahaan tanpa harus terlibat langsung didalamnya, sebaliknya pihak perusahaan memperoleh alternatif sumber dana tanpa menunggu tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan.

Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki potensi yang besar dibidang ekonomi. Potensi tersebut mulai diperhatikan oleh dunia, dan salah satu contoh yang dapat menggambarkan pengakuan internasional akan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat adalah kenaikan peringkat dari lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Fitch Ratings, Moody's dan Standard & Poor's. Pertumbuhan ekonomi yang tangguh, utang pemerintah yang rendah dan manajemen fiskal yang bijaksana dijadikan alasan untuk kenaikan penilaian

tersebut. Hal itu juga merupakan kunci dalam masuknya arus modal keuangan yang berupa dana asing ke Indonesia, baik aliran portofolio maupun investasi asing langsung yang meningkat secara signifikan.

Investasi yang dilakukan di Indonesia bukan berarti tanpa risiko. Indonesia adalah negara yang kompleks dan berisi risiko tertentu untuk investasi. Selama beberapa tahun terakhir Indonesia telah menunjukkan bahwa investasi tertentu sangat menguntungkan misalnya di pasar saham pada bidang properti atau komoditas, namun berinvestasi di Indonesia juga menyiratkan lebih banyak risiko dibandingkan berinvestasi di negara-negara yang maju karena Indonesia mempunyai dinamika dan karakteristik tertentu yang dapat menggagalkan investasi dan mengganggu iklim investasi. Dinamika tersebut antara lain yaitu tingginya tingkat korupsi, kurangnya kualitas dan kuantitas prasarana infrastruktur, kinerja pemerintah, bencana alam, dan isu kekerasan etnis atau agama.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Perekonomian Ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2015 tumbuh sebesar 4,67 persen atau melambat dibandingkan dengan triwulan II tahun 2014 yang mampu tumbuh 5,03 persen. Sementara itu pada triwulan sebelumnya, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,72 persen. Seperti yang terjadi sampai pertengahan tahun 2015 ini, berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia, tingkat inflasi sampai dengan bulan Agustus 2015 mencapai angka 2,29. Inflasi sendiri menurut Badan Pusat Statistik Indonesia adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok

masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Meskipun pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II tahun 2015 melambat atau relatif stagnan dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2015, namun perkembangan kinerja perekonomian menunjukkan kecenderungan yang membaik. Kinerja ekspor dan import telah meningkat pada bulan Juni 2015 dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan diharapkan terus mengalami peningkatan.

Secara historis, tingkat inflasi Indonesia lebih tinggi dibanding negara-negara berkembang lain. Sementara negara-negara berkembang lain tingkat inflasinya mencapai sekitar tiga sampai lima persen per tahun dalam periode 2005 sampai 2013, tingkat inflasi di Indonesia mencapai rata-rata 8.5 persen per tahun dalam periode yang sama. Namun, hal ini tentu harus diperhatikan, terutama bagi para investor dalam mengambil keputusan bisnis, karena tingkat inflasi ini tentu berdampak pula dalam kegiatan bisnis perusahaan. Terlebih perusahaan yang bisnisnya melakukan aktivitas ekspor atau impor sehingga transaksi yang mereka lakukan menggunakan mata uang asing.

Untuk itu, seorang investor harus melakukan penilaian atas kinerja perusahaan yang tercermin dari laporan keuangan tempat mereka akan melakukan aktivitas penanaman modal, agar dapat menghindari risiko yang mungkin terjadi ke depannya. Peningkatan kinerja perusahaan merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan para pemilik modal atau pemegang saham (Mahaputeri dan Yadnyana, 2014). Dalam menganalisis laporan keuangan, salah satu analisis yang dapat dilakukan adalah analisis rasio perusahaan (Meythi dan Mathilda, 2012). Rasio profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja

perusahaan. Rasio profitabilitas yang dapat digunakan yaitu *Earning per Share* (EPS) karena dapat menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa dan menggambarkan prospek *earning* perusahaan di masa depan. Selain itu EPS juga merupakan indikator yang paling sering diperhitungkan oleh para investor sebelum mengambil keputusan berinvestasi karena semua hasil yang dapat dicapai oleh perusahaan dapat memberikan dampak secara langsung terhadap jumlah keuntungan yang didapat sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Tingkat keuntungan yang dapat dihasilkan per lembar saham yang dimiliki oleh investor akan mempengaruhi penilaian investor terhadap suatu kinerja perusahaan emiten (Dewi dan Suaryana, 2013).

*Earning per Share* (EPS) adalah jumlah laba bersih yang dapat dihasilkan oleh perusahaan pada tiap lembar saham yang beredar (Labibah dan Dwimulyani, 2014). Jika dikur dari *Earning per Share* (EPS), kinerja perusahaan dapat dihitung dengan membandingkan antara laba bersih dikurang dengan preference dividends dibagi dengan jumlah rata-rata saham beredar. Tryfino (2009) dalam jurnal Labibah dan Dwimulyani (2014) mengungkapkan bahwa EPS berguna untuk mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam jurnalnya, Gunarianto (2012) mengatakan bahwa pada umumnya para investor akan mengharapkan manfaat dari investasinya dalam bentuk laba per lembar saham (EPS). Hal ini disebabkan EPS dapat menggambarkan jumlah keuntungan yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa, sedangkan jumlah EPS yang akan didistribusikan kepada investor saham tergantung pada kebijakan perusahaan dalam hal pembayaran deviden. (Gunarianto, 2012). Semakin tinggi nilai EPS

keuntungan pemegang saham akan semakin besar. Sebaliknya, EPS yang rendah menandakan bahwa perusahaan telah gagal memberikan kemanfaatan sebagaimana yang diharapkan oleh pemegang saham (Gunarianto, 2012).

Dalam meningkatkan kinerja perusahaan, manajemen juga merasa perlu dalam meningkatkan sistem tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan *Good Corporate Governance* sudah bukan hal baru bagi berbagai perusahaan di Indonesia, terlebih perusahaan besar yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance*, seharusnya telah memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance* yang telah menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya (Gozali, 2012). Dengan pengawasan terhadap GCG yang diterapkan pada perusahaan diharapkan penerapan GCG tersebut diperbaiki dan ditingkatkan agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan baik secara finansial maupun operasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Menurut sebuah kajian yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Corporate Governance* merupakan salah satu faktor penentu parahnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara (Oktapiyani, 2009 dalam Dewayanto, 2010). Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh Dewan Komisaris dan Auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang *fair*. Lemahnya penerapan *corporate governance* inilah

yang menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan. Banyak pihak yang mulai berpikir bahwa penerapan *corporate governance* menjadi suatu kebutuhan di dunia bisnis sebagai barometer akuntabilitas dari suatu perusahaan (Dewayanto, 2010).

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan perbankan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Tujuan penetapannya adalah meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Penerapan *good corporate governance* ini dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan *good corporate governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan *corporate governance* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri (Dewayanto, 2010).

*Corporate Governance* merupakan konsep yang diajukan guna peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja

manajemen serta menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (Nasution dan Setiawan, 2007 dalam Tjondro, 2011). Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi para *stakeholders*. Sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi *stockholder* dan *stakeholder* sehingga mereka akan yakin memperoleh imbal hasil atas investasinya dengan benar (Tjondro, 2011).

Tujuan penerapan *good corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal perusahaan seperti dewan direksi, dewan komisaris, karyawan, dan pihak eksternal perusahaan yang meliputi investor kreditur, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*) (Arifin, 2005 dalam Widagdo, 2014). Setiap pihak-pihak ini tentu memiliki tugas dan wewenang dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Posisi mereka sendiri dalam perusahaan bisa saja memegang peran penting bagi kelangsungan hidup sebuah perusahaan.

Dalam mengelola perusahaan menurut kaedah-kaedah umum *Good Corporate Governance*, peran komisaris independen sangat diperlukan. Semakin tinggi perwakilan dari *outsider director* (komisaris independen), maka semakin tinggi independensi dan efektivitas *corporate board* sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Lastanti, 2004 dalam Dewayanto, 2010). Komisaris Independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktek-praktek transparansi, pengungkapan,



kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian (negara).

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, telah mengatur bahwa dalam anggaran dasar perseroan dapat menyatakan untuk menempatkan minimal satu orang komisaris independen dan satu orang komisaris utusan. Peraturan Bapepam No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat ekuitas di bursa huruf C-1, juga menyatakan dimana dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan yang baik (*Good Corporate Governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh komisaris.

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi sebagai penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan guna memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan (Mayangsari, 2003 dalam Guna dan Herawaty, 2010). Dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah anggota komisaris independen dalam perusahaan, maka akan meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap manajemen perusahaan yang lebih baik. Jika manajemen perusahaan dapat bekerja dengan baik, maka diharapkan dapat berdampak baik pula bagi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dengan adanya dewan komisaris independen, diharapkan fungsi pengawasan terhadap dewan direksi dan manajemen perusahaan menjadi lebih optimal dan penilaian atas kinerja manajemen menjadi

lebih objektif, sehingga manajemen perusahaan akan terus meningkatkan kinerjanya, yang mana berimbas pula pada meningkatnya kinerja perusahaan. Meningkatnya kinerja perusahaan ini berkaitan dengan laba dan *Earning per Share* (EPS) perusahaan, jika laba yang diperoleh perusahaan besar, maka EPS yang dihasilkan juga akan besar.

Adanya komisaris independen diharapkan juga dapat mengurangi konsumsi manajer dan semakin banyaknya komisaris independen dapat memonitor perusahaan dengan lebih dekat, dan melakukan tindakan terkait dengan tata kelola perusahaan yaitu mengurangi manajemen puncak yang memiliki kinerja buruk (Syeikh *et al.*, 2013 dalam Tertius dan Christiawan, 2015). Tertius dan Christiawan (2015) menyatakan bahwa semakin besar jumlah dari komisaris independen dalam perusahaan menyebabkan manajemen perusahaan tidak dapat melakukan kecurangan sehingga kinerja perusahaan bagus dan sehat. Dengan adanya kinerja perusahaan yang bagus dan sehat inilah, diharapkan dapat meningkatkan nilai *Earning per Share* yang dihasilkan oleh perusahaan.

Saat ini, banyak bank di Indonesia yang dimiliki oleh pemodal asing. Kepemilikan asing yang relatif besar pada perbankan Indonesia dapat terjadi karena kebijakan kepemilikan bank oleh pihak asing di Indonesia relatif lebih terbuka atau lebih longgar dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kepemilikan asing dapat dilihat sebagai salah satu mekanisme yang melengkapi struktur pemerintahan saat ini untuk mengawasi manajemen dari aktivitas *maximizing*. Sehingga, investor asing akan lebih memilih mendukung kebijakan

untuk meminimalkan risiko yang ada di perbankan sehingga mencapai tujuan perusahaan tersebut (Rachmadan, 2013).

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Rachmadan (2013) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa kepemilikan asing merupakan porsi *outstanding share* yang dimiliki oleh investor atau pemodal asing (*foreign investors*) terhadap jumlah seluruh modal saham yang beredar. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap peningkatan *Good Corporate Governance*. Akan tetapi, jumlah kepemilikan asing yang terlalu besar juga dianggap tidak baik bagi pengawasan manajemen perusahaan. Dengan tersebarnya mayoritas kepemilikan saham kepada kepemilikan asing (*foreign ownership*) maka pelaksanaan monitoring para pemegang saham kepada pihak manajemen perusahaan menjadi lemah karena pemegang saham tidak mempunyai insentif dan kemampuan untuk memonitor manajemen (Dewayanto, 2010). Hal ini bisa memunculkan konflik kepentingan yang mengakibatkan kinerja perusahaan menjadi buruk. Jika kurangnya monitoring terhadap perusahaan berdampak pada kinerja perusahaan yang menurun, maka laba yang dihasilkan perusahaan tidak akan sesuai dengan target, dan menyebabkan EPS perusahaan menjadi kecil.

Namun, dengan semakin banyaknya pihak asing yang menanamkan sahamnya di perusahaan juga dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan yang di investasikan sahamnya, hal ini terjadi karena pihak asing yang menanamkan modal sahamnya memiliki sistem manajemen, teknologi dan inovasi, keahlian dan

pemasaran yang cukup baik yang bisa membawa pengaruh positif bagi perusahaan (Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Meningkatnya kinerja perusahaan tersebut kemudian akan berdampak pada hasil *Earning per Share* perusahaan yang cukup besar.

Seperti halnya perusahaan lain yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, perusahaan perbankan juga perlu adanya audit atas laporan keuangan, sehingga kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor eksternal memegang peranan penting bagi penilaian investor terhadap nilai perusahaan. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana seorang auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar *auditing* dan kode etik akuntan publik yang relevan (Hardiningsih, 2010).

Kualitas audit yang dilakukan oleh KAP *Big 4* berbeda dengan *Non Big 4*, karena oleh KAP *Big 4* akan berpengaruh terhadap nilai suatu perusahaan. Investor menilai bahwa hasil audit oleh KAP *Big 4* dilakukan dari luasnya pemeriksaan sehingga kredibilitasnya dapat diandalkan. Auditor yang bekerja di KAP *Big 4* dianggap lebih berkualitas karena auditor tersebut dibekali oleh serangkaian pelatihan dan prosedur serta memiliki program audit yang dianggap lebih akurat dan efektif dibanding dengan auditor dari KAP *Non Big 4* (Istanta, 2008 dalam Guna dan Herawaty, 2010).

Fitriyani *et al.* (2014) mengungkapkan bahwa jasa audit yang berkualitas akan berdampak pada peningkatan kepercayaan pengguna laporan keuangan

bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Laba yang dihasilkan perusahaan yang laporan keuangannya telah diaudit akan memberi kepercayaan pada pengguna laporan keuangan seperti investor bahwa laba tersebut memang jumlah yang benar dihasilkan oleh perusahaan. Sehingga, jika perusahaan yang telah diaudit menghasilkan laba yang besar, maka nilai *earning per share* nya pun akan besar, dan sebaliknya jika perusahaan yang telah diaudit tersebut menghasilkan laba yang kecil, maka nilai *earning per share* pun akan kecil.

Dalam usahanya untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik pun, ukuran dari perusahaan tersebut cukup memegang banyak pengaruh terhadap kinerja perusahaan tersebut. Menurut Sari *et al.* (2010), ukuran perusahaan menunjukkan pengalaman dan kemampuan tumbuhnya suatu perusahaan dalam mengelola investasi yang ditanamkan para pemegang saham. Secara umum, perusahaan besar akan lebih transparan dalam mengungkapkan informasi dibandingkan dengan perusahaan yang berskala kecil. Perusahaan yang besar lebih menjanjikan kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang ukuran lebih kecil. Tidak hanya itu, ukuran perusahaan menunjukkan jumlah pengalaman dan kemampuan dalam mengelola tingkat risiko investasi yang diberikan oleh para pemegang saham untuk meningkatkan kemakmuran mereka (Mahaputeri dan Yadnyana, 2014).

Perusahaan besar lebih dikenal dan diperhatikan oleh pemerintah, investor dan masyarakat umum, dibandingkan perusahaan kecil. Karena itu, perusahaan

besar mendapatkan tekanan yang lebih kuat untuk menyajikan laporan keuangan yang kredibel dan menghindari tindakan manajemen laba untuk menjaga penilaian positif dari publik (Sylvia dan Siddharta, 2010 dalam Putri dan Sofyan, 2013). Semakin kecil perusahaan semakin besar pengelolaan laba yang dilakukan. Hal ini mengindikasikan pengelolaan laba perusahaan kecil tidak efisien sehingga dibutuhkan pengawasan dari pihak regulator (Putri dan Sofyan, 2013).

Besar kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan manajemen untuk mengoperasikan perusahaan dengan berbagai situasi dan kondisi yang dihadapinya. Kemampuan untuk mengoperasikan perusahaan tersebut dapat mempengaruhi kinerja perusahaan ke depannya untuk memperoleh laba sesuai dengan target perusahaan pada periode tertentu. Ukuran perusahaan yang besar seharusnya menghasilkan laba yang besar juga, karena perusahaan besar pada umumnya mempunyai beragam produk dan beroperasi di berbagai wilayah termasuk luar negeri sehingga biasanya dapat menghasilkan nilai *earning per share* yang besar pula. Sementara itu, ukuran perusahaan yang kecil biasanya menghasilkan laba yang tidak begitu besar, karena ada kemungkinan pendapatan perusahaan digunakan untuk mengembangkan perusahaan dari tahun ke tahun sehingga nilai *earning per share* yang dihasilkan pun tidak begitu besar.

Jika secara keseluruhan mekanisme di atas dapat berdampak baik bagi peningkatan tata kelola perusahaan, maka hal tersebut juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja perusahaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan laba serta nilai *Earning per Share*, sehingga perusahaan akan dapat memperoleh manfaat bukan hanya dari berjalannya manajemen sesuai dengan

prinsip GCG, tetapi juga memenuhi harapan pemegang saham dan pemegang kepentingan lainnya untuk memperoleh manfaat dari aktivitas penanaman modal yang dilakukan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widagdo (2014) dan Tertius dan Christiawan (2015) yang menguji mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Widagdo (2014) dan Tertius dan Christiawan (2015) adalah sebagai berikut.

1. Penggunaan variabel dependen yaitu Kinerja Perusahaan yang diukur dari *Earning per Share* yang mengacu pada jurnal Widagdo (2014), sedangkan pada jurnal Tertius dan Christiawan (2015) variabel dependen yang digunakan yaitu *Return On Asset (ROA)*.
2. Penggunaan variabel independen yaitu Mekanisme *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan Komisaris Independen (Tertius dan Christiawan, 2015), dan Kepemilikan Asing (Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Kualitas Audit sebagai variabel independen mengacu pada jurnal Fitriyani (2014), dan Ukuran Bank yang mengacu pada jurnal Tertius dan Christiawan (2015).
3. Pada penelitian Tertius dan Christiawan (2015) periode yang digunakan adalah pada tahun 2011-2013, sedangkan periode yang digunakan pada penelitian Widagdo (2014) yaitu pada tahun 2012. Periode yang digunakan pada penelitian ini adalah 4 tahun dari tahun 2011-2014.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik membahas penelitian ini lebih dalam dengan judul **“PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, KUALITAS AUDIT DAN UKURAN BANK TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2011-2014)”**.

## **1.2 Batasan Masalah**

Batasan masalah yang dijelaskan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ada beberapa hal yang mempengaruhi penerapan *Good Corporate Governance*, tetapi peneliti hanya mengambil beberapa diantaranya yaitu komisaris independen dan kepemilikan asing, serta menambahkan kualitas audit dan ukuran bank sebagai variabel independen yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang diukur dengan *Earning per Share* sebagai variabel dependen.
2. Sektor yang dipilih peneliti adalah sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena sektor ini merupakan sektor yang berpotensi besar terhadap perekonomian negara, sehingga penerapan *Good Corporate Governance* pada sektor ini dapat berperan penting dalam memajukan perekonomian di Indonesia.
3. Periode yang dipilih adalah 4 tahun dari tahun 2011-2014.



### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah mekanisme GCG yang diproksikan dengan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah mekanisme GCG yang diproksikan dengan kepemilikan asing berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
4. Apakah ukuran bank berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

Rumusan masalah inilah yang akan peneliti teliti berdasarkan data sekunder dari perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang sudah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme GCG yang diproksikan dengan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme GCG yang diproksikan dengan kepemilikan asing terhadap kinerja perusahaan.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kualitas audit terhadap kinerja perusahaan.

4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran bank terhadap kinerja perusahaan.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini tidak hanya sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas akhir, tetapi juga dapat memberi banyak manfaat bagi berbagai pihak yang terkait langsung dengan penerapan *Good Corporate Governance*, antara lain:

1. Bagi manajemen perusahaan dan *Board of Director* dalam usahanya untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada, khususnya pada perusahaan perbankan di Indonesia.
2. Bagi investor, diharapkan dapat menambah informasi bagi pengambilan keputusan penanaman modal.
3. Bagi mahasiswa dan akademisi, dapat menjadi sumber referensi dan dasar pengembangan penelitian selanjutnya.
4. Bagi pihak peneliti, semoga penelitian ini dapat menambah pengalaman peneliti untuk terus belajar dan mengolah berbagai data dan informasi sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, dan orang lain.

## 1.6 Sistematika Penelitian

Agar memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai pembahasan penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan, sebagai berikut.

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

## BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini terdiri dari pembahasan secara rinci terkait dengan Industri Perbankan, *Earning per Share*, *Good Corporate Governance*, Komisaris Independen, Kepemilikan Asing, Kualitas Audit, dan Ukuran Bank, dari berbagai Jurnal, Penelitian Terdahulu, Perumusan Hipotesis yang akan diuji, dan Model Penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas Gambaran Umum Objek Penelitian, Metode Penelitian, Variabel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, pengujian, dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.